

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI
SUMATERA UTARA**

RINGKASAN SKRIPSI



MUHAMMAD TRIYOGI SEPTI ANGGORO

1117 29814

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN
NEGARA YOGYAKARTA**

FEBRUARI, 2021

SKRIPSI

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD TRIYOGI SEPTI ANGGORO

No IndukMahasiswa: 111729814

Telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 25 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

M. Arif Budiarto, Drs., M.Si., Ak., CA.

Penguji

Tri Ciptaningsih, SE., MM., Ak.

Yogyakarta, 25 Februari 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:

MUHAMMAD TRIYOGI SEPTIANGGORO

STIE YKPN YOGYAKARTA

E-mail: mtriyogisepti@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the influence of regional financial performance toward the capital expenditure allocation of the regency/city of North Sumatra. The regional financial performance was measured by regional financial independence, original revenue effectiveness, and regional financial efficiency. This research takes the data of regency and city of North Sumatra that have a regional report on budget outcomes and local government budget on 2015-2019. The results show that: (1) regional financial performance that measured by Regional Financial Independence, significantly, have a negative effect on the Capital Expenditure Allocation; (2) regional financial performance that measured by Original Revenue Effectiveness ratio have no significant negative effect on the Capital Expenditure Allocation; (3) regional financial performance that measured by Regional Financial Efficiency, significantly, have a positive effect on the Capital Expenditure Allocation.

Keyword: regional financial performance, capital expenditure allocation

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjadi awal dilaksanakan otonomi daerah, dimana didalamnya terdapat konsekuensi untuk melakukan pengelolaan keuangan yang dijalankan sendiri oleh setiap daerah. Lahirnya Undang-Undang tersebut mengakibatkan daerah menjadi lebih mandiri dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahannya. Pengelolaan keuangan daerah dinyatakan didalam APBD yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan PP No 15 Tahun 2002, APBD disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja, dimana *input* yang ditetapkan disusun untuk mencapai suatu *output* tertentu (Hygi Prihastuti dkk., 2015).

Dalam mengelola keuangan daerah, prinsip *value for money* harus terpenuhi, untuk selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang efektif agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, efisien agar tidak terjadi pemborosan anggaran, ekonomis, tertib, transparan, bertanggung jawab serta harus menaati peraturan undang-undang, yang seluruhnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat, sebagaimana yang tercantum didalam pasal 66 UU No. 33 tahun 2004 (Indiyanti dan Rahyuda, 2018). Pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bagian dari tugas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan serta memenuhi prinsip keterbukaan dalam mengelola keuangan daerah. Penilaian baik tidaknya pemerintah pusat maupun daerah untuk memenuhi tugas-tugas yang telah diamanatkan dapat terlihat dari laporan keuangan yang telah disusun tersebut.

Pengelolaan keuangan di daerah seharusnya berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai apabila prioritas untuk belanja modal lebih diutamakan terlebih, yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga pendapatan daerah lebih teralokasikan dengan baik. Namun pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kenyataannya keinginan tersebut masih sulit untuk dicapai karena adanya moral hazard (Riswan dan Affandi, 2014).

Dalam struktur APBD, belanja barang dan jasa merupakan suatu investasi bagi daerah yang pada akhirnya akan menjadi injeksi. Sebaliknya, belanja pegawai serta belanja lain-lain merupakan belanja yang sifatnya konsumtif dan dapat menyebabkan kebocoran pada anggaran. Dengan besarnya belanja pegawai pada APBD, maka pemerintha daerah akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan program-program yang akan meningkatkan pelayanan kepada publik, seperti infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan dan program lain yang menjadi stimulus bagi pembangunan ekonomi di daerah (Adam, 2019).

Menurut Todaro (2003) dalam (Rofii dan Ardyan, 2017) terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah akumulasi modal. Akumulasi modal terkait erat dengan belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Besar kecilnya akumulasi modal yang diperuntukan oleh pemerintah daerah dapat tercermin dalam belanja modal yang tercantum didalam APBD. Selain itu, besaran belanja modal diakibatkan juga oleh seberapa baik kinerja keuangan daerah tersebut (Hygi Prihastuti dkk., 2015).

Selain itu, belanja modal di Sumatera Utara juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Alokasi belanja modal yang masih rendah, yaitu dibawah 30%. Bahkan tahun 2015-2019 alokasi belanja modal pemerintah provinsi Sumatera Utara berada dibawah 20%. Hal tersebut semakin parah jika melihat alokasi belanja modal tahun 2018-2019 yang mengalami tren penurunan.

Menurut Halim (2008) dalam (Indiyanti & Rahyuda, 2018) kemandirian keuangan mencerminkan seberapa mampu daerah ketika melakukan pengelolaan *resources* yang daerah punya dengan mandiri. Hal tersebut dapat diukur dengan cara membuat perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan yang didapatkan daerah yang asalnya dari bantuan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintah pusat, provinsi serta pinjaman. Berdasarkan (Marlina, 2018) kemandirian keuangan mempunyai pengaruh yang positif terhadap terhadap pengalokasian belanja modal. Kesimpulan yang dikemukakan tersebut tidak sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Zelmianti (2016), penelitiannya mengungkapkan bahwasannya kemandirian keuangan daerah mempunyai dampak yang negatif atas pengalokasian belanja modal.

Rasio efektivitas PAD melihat sejauh mana realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh dan kemudian dilakukan perbandingan dengan target penerimaan PAD yang tercantum didalam APBD. Rasio ini dapat dikatakan efektif apabila hasil perhitungannya minimal 100% (Anggraeny dkk., 2017). Penelitian yang dilakukan (Marlina, 2018) menyatakan bahwasannya besara alokasi belanja modal dipengaruhi secara positif oleh efektivitas pendapatan asli daerah. Tetapi kesimpulan tersebut berbeda dengan yang disimpulkan oleh Indiyanti dan Rahyuda (2018), dimana mereka menyebutkan bahwa besaran alokasi belanja modal dipengaruhi secara negatif oleh efektivitas pendapatan asli daerah.

Menurut Mahmudi (2010) pengukuran kinerja keuangan di daerah melalui rasio efektivitas PAD masih belum cukup, karena apabila rasio efektivitasnya telah baik namun untuk mencapai hasil tersebut dibutuhkan biaya yang besar, maka perolehan PAD tersebut tidak efisien. Maka dari itu diperlukan pengukuran kinerja keuangan berupa efisiensi keuangan daerah. Rasio efisiensi dicari dengan melakukan perbandingan total belanja dengan total pendapatan (Tamawiyw dkk., 2016). Arif dan Arza (2018) mengutarakan besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi secara positif oleh tingkat efisiensi keuangan daerah. Kesimpulan yang berbeda didapatkan oleh Indiyanti dan Rahyuda (2018) yang mengungkapkan bahwa tingkat efisiensi keuangan pada suatu daerah akan mempengaruhi alokasi belanja modal secara negatif. Jika melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal kabupaten dan kota di provinsi sumatera utara.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini mengulas tentang ikatan keagenan antara 2 pihak, yakni agent serta principal. Hubungan keagenan yang dimaksud ialah sebuah kontrak antara *principal* yang memberi perintah kepada *agent* untuk memberikan jasanya, dengan memberikan beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada *agent* untuk memaksimalkan keuntungan *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). *Agent* bertanggung jawab untuk dapat membuat keuntungan para pemilik (*principal*) menjadi maksimal, sementara itu *agent* juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, “belanja modal adalah bagian pengeluaran dari anggaran yang dimanfaatkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset-aset lain yang akan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Dari pengertian yang telah dijelaskan, maka aset tetap sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk dapat menunjang kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Untuk dapat memperoleh aset tetap, yang diperlukan pemerintah adalah mengalokasikan belanja daerah dalam bentuk belanja daerah. Dalam memenuhi keperluan untuk menjalankan tugas aparatur daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat, maka diperlukan sarana dan prasarana dimana setiap daerah memiliki kebutuhannya masing-masing, sehingga belanja modal yang dikeluarkan disesuaikan dengan kebutuhan daerah (Abdullah dan Halim, 2006). Maka dari itu disimpulkan bahwa belanja modal bisa dialokasikan baik untuk pelayanan masyarakat secara langsung maupun yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat luas (belanja aparatur).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kinerja Keuangan Daerah

Jika kinerja dilihat pada sektor pengelolaan keuangan di daerah, maka kinerja keuangan daerah didefinisikan sebagai pencapaian dari kegiatan atau program pemerintahan, baik yang baru akan dilaksanakan maupun yang telah tercapai, terhadap penggunaan anggaran yang dapat diukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang dapat dilihat dengan tingkat efisiensi terhadap layanan yang telah disediakan terhadap publik (Sumarjo, 2010).

Saat ini penelitian-penelitian pada sektor publik khususnya penelitian tentang kinerja keuangan daerah masih mengandalkan rasio keuangan sebagai cara untuk bisa menganalisis bagaimana kinerja suatu pemerintahan dalam mengelola keuangannya. Rasio keuangan dapat diartikan sebagai hasil dari kegiatan membandingkan angka-angka yang terdapat pada suatu bagian pada *financial statement* dengan bagian lain yang berhubungan (Hery, 2015).

Rasio Kemandirian

Tingkat kemandirian suatu daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, membangun daerah, serta melayani masyarakat dicerminkan melalui kemandirian keuangan daerah (Zuhri dan Soleh, 2016). Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari besaran PAD dibanding dengan sumber pendapatan selain PAD, seperti transfer dari pemerintah pusat/provinsi, dan pinjaman dari daerah lain.

Rasio efektivitas PAD

Efektivitas pada sektor publik erat kaitannya dengan kesuksesan penyedia pelayanan publik untuk mewujudkan program yang telah disusun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Dwijayanti, 2015). Efektivitas PAD menunjukkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang sebelumnya telah disusun didalam APBD dan ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki (Pramono, 2014).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Dari segi keuangan daerah, efisiensi berarti kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan belanja yang diperlukan. Efisiensi dalam keuangan daerah juga dapat diartikan sebagai pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menerima pendapatan (Rahmayati, 2016).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan penelitian Marlina (2018) dan Gerungan dkk. (2015) terungkap jika kemandirian keuangan mempunyai dampak yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Pernyataan tersebut semakin diperkuat oleh Indiyanti dan Rahyuda (2018) dengan mengemukakan pernyataan berupa rasio kemandirian keuangan tahun lalu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dengan pertimbangan tersebut maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H_{a1}: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan terhadap alokasi belanja modal.

Salah satu komponen terpenting untuk menjalankan otonomi daerah adalah dengan adanya pendapatan asli daerah. Sehingga kemampuan daerah untuk bisa memperoleh pendapatan asli daerah secara maksimal menjadi hal yang harus diperhatikan. Kapabilitas daerah untuk memenuhi target penerimaan PAD yang telah ditetapkan tergambar dengan rasio efektivitas PAD. Tidak tercapainya target penerimaan PAD akan mengganggu terealisasinya belanja modal. Hal itu sesuai penelitian Marlina (2018) dan Delima dkk. (2016) yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi secara signifikan oleh efektivitas PAD. Melihat berbagai hal itu maka penulis menyusun hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_{a2}: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja keuangan daerah berupa efektivitas PAD terhadap alokasi belanja.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Efisiensi keuangan daerah menggambarkan tingkat realisasi pengeluaran dan pendapatan daerah. Semakin kecil rasio yang didapat, maka tingkat efisiensi keuangan di daerah tersebut semakin tinggi. Jika daerah telah memiliki tingkat efisiensi yang baik, maka pengeluaran yang dilakukan daerah juga dialokasikan dengan baik, termasuk belanja modal. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Arif dan Arza (2018), Delima dkk. (2016), Gerungan dkk. (2015), serta Martini (2015) yang mendapatkan hasil bahwa rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Maka hipotesis yang terbentuk adalah:

H_{a3}: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja keuangan daerah berupa efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal.

Hipotesis diatas menyatakan kinerja keuangan dengan setiap indikator yang digunakan pada penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dengan pertimbangan tersebut maka indikator-indikator kinerja keuangan tersebut juga akan dapat mempengaruhi alokasi belanja modal secara simultan. Dengan pertimbangan itu maka penulis merumuskan hipotesis keempat berupa:

H_{a4}: Terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan, efektivitas pendapatan asli daerah, dan efisiensi keuangan daerah secara simultan terhadap alokasi belanja modal.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian meliputi semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Sementara waktu penelitian adalah selama 2015-2019.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sampel dan Data Penelitian

Sampel yang digunakan pada penelitian yaitu kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang memiliki data berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta APBD selama periode 2015-2019. Data yang dipakai pada penelitian berupa data kuantitatif. Selain itu data yang dipakai pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dari situs (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>). Data pada penelitian ini juga merupakan data panel, karena mencakup beberapa objek pengamatan (*cross section*).

Jenis dan Definisi Operasional Variabel

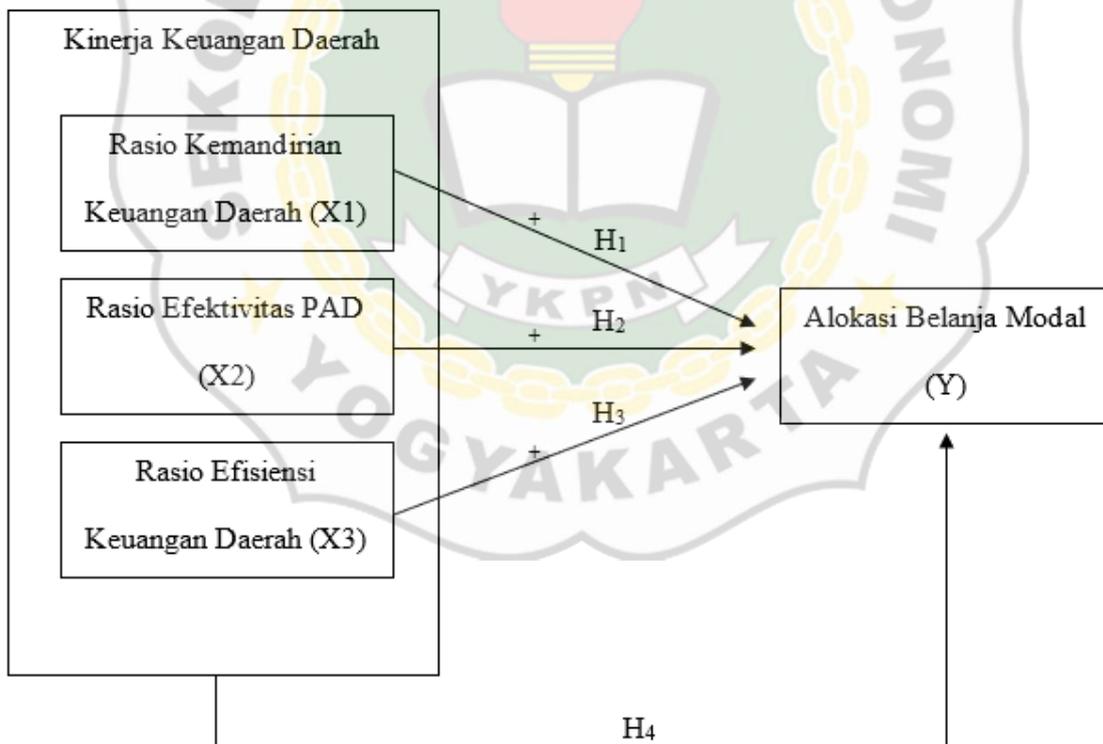
Variabel independen yang dipakai berupa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu variabel kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah. Sementara itu alokasi belanja modal ditetapkan sebagai variabel dependen.

No.	Variabel	Definisi	Formula	Skala
1	Kemandirian Keuangan Daerah (X1)	Tingkat kemandirian suatu daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, membangun daerah, serta melayani masyarakat	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
2	Efektivitas PAD (X2)	Tingkat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang sebelumnya telah disusun didalam APBD dan ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3	Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	Pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menerima pendapatan	$\frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$	Rasio
4	Alokasi Belanja Modal (Y)	Belanja daerah yang digunakan untuk menambah aset atau kekayaan daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran atau 12 bulan.	$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$	Rasio

Model Penelitian



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		165
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,51475751
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,072
	Negative	-,038
Kolmogorov-Smirnov Z		,922
Asymp. Sig. (2-tailed)		,363

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dengan melihat hasil tabel pengujian diatas, terlihat bahwasannya nilai *asymptotic significance* adalah 0,363. Dengan nilai signifikansi yang diharapkan adalah 5%, maka nilai tersebut telah melampau nilai (α), dengan kata lain maka dapat disimpulkan penelitian ini memenuhi data penelitian normal. Sehingga kesimpulan untuk asumsi pertama telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel Uji Multikolinearitas

Correlations

		lnX1	lnX2	lnX3
lnX1	Pearson Correlation	1	,158(*)	,075
	Sig. (2-tailed)		,043	,340
	N	165	165	165
lnX2	Pearson Correlation	,158(*)	1	-,038
	Sig. (2-tailed)	,043		,632
	N	165	165	165
lnX3	Pearson Correlation	,075	-,038	1
	Sig. (2-tailed)	,340	,632	
	N	165	165	165

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berlandaskan pada informasi yang didapatkan dari tabel diatas, terlihat bahwa seluruh koefisien korelasi antar setiap variabel independen dibawah angka 0,8. Koefisien korelasi antara lnX1 dan lnX2 yaitu $0,043 < 0,8$ sehingga terbebas dari masalah multikolinearitas. Koefisien korelasi antara lnX1 dan lnX3 $0,340 < 0,8$ sehingga terbebas dari masalah multikolinearitas. Pada lnX2 dan lnX3 memiliki koefisien rasio $0,632 < 0,8$ yang juga terbebas dari masalah multikolinearitas. Secara keseluruhan variabel-variabel independen yang digunakan tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel Uji Heteroskedastisitas

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t		Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error	
1	(Constant)	,151	,701		,215	,830	
	lnX1	-,019	,010	-,144	-1,823	,070	
	lnX2	-,015	,022	-,054	-,691	,491	
	lnX3	,006	,150	,003	,039	,969	

a. Dependent Variable: RESIDUAL2

Berlandaskan atas informasi yang dimuat pada tabel 4.5 dapat terlihat bahwa hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *significance* diatas 5% yaitu kemandirian keuangan daerah (lnX1) = 0,070, rasio efektivitas PAD (lnX2) = 0,491 dan rasio efisiensi keuangan daerah (lnX3) = 0,969. Dengan informasi yang ditunjukkan tersebut maka kesimpulannya adalah data dalam penelitian terbebas dari heteroskedastisitas.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Autokorelasi

Tabel 4.1 Uji Autokorelasi DW

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,305(a)	,093	,076	5,56493	1,985

a Predictors: (Constant), lnX3, lnX2, lnX1

b Dependent Variable: lnY

Hasil perhitungan menunjukkan nilai statistik uji DW = 1,985. Pengujian ini menggunakan $\alpha = 5\%$ dan sampel (n) sebanyak 165, serta banyaknya variabel independen (k) = 3, dengan data tersebut maka digunakan tabel durbin-watson untuk melengkapi informasi nilai dL. Nilai dL = 1,7085 dan nilai dU = 1,7825. Dengan hasil tersebut maka nilai $dU < DW < (4-dU)$ atau $1,7085 < 1,985 < 2,2915$. Kondisi tersebut menyimpulkan bahwasannya tidak terjadi autokorelasi. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut maka seluruh kriteria uji asumsi klasik terpenuhi dan dapat dilakukan pengujian ke tahap yang berikutnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.2 Regresi Linear Berganda

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t		Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error	
1	(Constant)	-2,202	2,108		-1,045	,298	
	lnX1	-,069	,031	-,169	-2,196	,030	
	lnX2	-,051	,067	-,058	-,753	,452	
	lnX3	1,221	,451	,206	2,710	,007	

a Dependent Variable: lnY

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari hasil tersebut, maka persamaan regresi yang yang didapatkan pada penelitian ini adalah:

$$Y = -2,202 - 0,069\ln X1 - 0,051\ln X2 + 1,221\ln X3 + \varepsilon$$

Uji Hipotesis

Uji Parsial atau Uji t

Tabel 4.3 Uji t

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t		Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error	
1	(Constant)	-2,202	,2108		-1,045		,298
	lnX1	-,069	,031	-,169	-2,196		,030
	lnX2	-,051	,067	-,058	-,753		,452
	lnX3	1,221	,451	,206	2,710		,007

a. Dependent Variable: lnY

Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dengan Alokasi Belanja Modal

Dari informasi yang diperoleh pada tabel 4.8 diketahui bahwa hasil pengujian uji t kinerja keuangan dengan indikator kemandirian keuangan daerah (lnX1) terhadap alokasi belanja modal (lnY) menghasilkan *significance* sebesar 0,030 dan t-hitung -2,196. Nilai t-hitung bernilai negatif sehingga keputusan dari pengujian ini adalah menolak H_{a1} . Kesimpulan dari hasil tersebut adalah tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal.

Hasil penelitian yang diperoleh sependapat dengan Gerungan dkk. (2015) serta Marlina (2018) yang menyatakan bahwasannya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kemandirian keuangan daerah secara parsial. Namun temuan dalam penelitian ini bertentangan dengan Delima dkk. (2016) serta Arif dan Arza (2018) yang mengungkapkan bahwa dampak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kemandirian keuangan pada alokasi belanja modal tidak signifikan. Zelmianti (2016) juga menemukan hal yang sama seperti yang penulis temukan pada penelitian, dimana kemandirian keuangan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun berbeda dengan Indiyanti dan Rahyuda (2018) yang ternyata menemukan bahwa pengaruh yang ditimbulkan kemandirian keuangan adalah positif. Perbedaan yang terjadi dengan beberapa penelitian sebelumnya karena adanya perbedaan objek dan waktu penelitian, dimana setiap daerah memiliki kebijakan sendiri dalam mengelola keuangannya sehingga kinerja keuangan pada setiap daerah terdapat perbedaan.

Hubungan Efektivitas PAD dengan Alokasi Belanja Modal

Dari informasi yang diperoleh dari tabel 4.7, hasil pengujian kinerja keuangan dengan indikator efektivitas pendapatan asli daerah ($\ln X_2$) terhadap alokasi belanja modal ($\ln Y$) menghasilkan nilai t_{hitung} yaitu $-0,753$ dan *significance* sebesar $0,452$. Nilai tersebut bernilai negatif dan melebihi nilai α yaitu 5% ($0,452 > 0,05$). Dengan hasil itu, keputusan dari pengujian ini adalah menolak H_{a2} . Dengan kata lain, disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja keuangan daerah berupa efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal.

Hasil yang peneliti temukan sesuai dengan Indiyanti dan Rahyuda (2018) dimana mereka menyimpulkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan efektivitas PAD adalah negatif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. Zelmianti (2016) dan Arif Arza (2018) juga menyimpulkan pengaruh yang ditimbulkan efektivitas pendapatan asli daerah tidak signifikan dengan alokasi belanja modal. Tetap hasil tersebut berbeda dengan yang ditemukan Marlina (2018), Delima dkk. (2016), serta Gerungan dkk. (2015) dimana mereka menyimpulkan kalau efektivitas pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan atas alokasi belanja modal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hubungan Efisiensi Keuangan Daerah dengan Alokasi Belanja Modal

Dari informasi yang tertera pada tabel 4.7, hasil pengujian pada uji parsial efisiensi keuangan daerah (lnX3) terhadap alokasi belanja modal (lnY) menghasilkan nilai t_{hitung} 2,710 dan *significance* sebesar 0,007. Angka tersebut tidak bernilai positif dan melebihi α yang ditetapkan yaitu 0,05 ($0,007 < 0,050$) sehingga keputusan dari pengujian ini adalah menerima H_a (H_3). Dari hasil tersebut disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja keuangan daerah berupa efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal.

Hasil yang sama juga ditemukan oleh Delima dkk. (2016) dan Gerungan dkk. (2015) yang pengaruh yang ditimbulkan efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal adalah signifikan. Pengaruh yang positif serta signifikan juga ditemukan oleh Arif dan Arza (2018). Sementara itu Martini (2015), menyimpulkan pengaruh efisiensi keuangan daerah adalah negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil yang berbeda juga dinyatakan oleh Indiyanti dan Rahyuda (2018) yang menyimpulkan pengaruh efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal tidak signifikan.

Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Efisiensi Keuangan Daerah dengan Alokasi Belanja Modal

Tabel 4.4 Uji F

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,867	3	,289	4,252	,006(a)
	Residual	10,947	161	,068		
	Total	11,814	164			

a Predictors: (Constant), lnX3, lnX2, lnX1

b Dependent Variable: lnY

Pada tabel hasil uji F, diperoleh signifikansi sebesar 0,006. Dengan hasil tersebut terlihat bahwa Sig. tidak melebihi α yaitu $0,006 < 0,05$. Dengan hasil itu maka uji F pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penelitian ini menolak H_{04} dan menerima H_{a4} , yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah secara simultan terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Sumatera Utara.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,305(a)	,093	,076	5,56493

a. Predictors: (Constant), lnX3, lnX2, lnX1

Dari hasil diatas memperlihatkan bahwa nilai *adjusted R square* adalah 0,076. Dengan variabel independen yang dipakai pada penelitian ini sebanyak 3, maka yang dipakai adalah nilai *adjusted R Square*. Nilai tersebut menjelaskan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan efisiensi keuangan daerah dalam mempengaruhi alokasi belanja modal adalah sebesar 7,6%. Sementara itu, variable lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini menjelaskan alokasi belanja modal sebesar 92,4%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kinerja keuangan berupa kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.
2. Kinerja keuangan berupa efektivitas PAD memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.
3. Kinerja keuangan berupa efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Kinerja keuangan daerah berupa kemandirian, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan didaerahnya dengan lebih baik agar kinerja keuangannya dapat meningkat sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat untuk peningkatan alokasi belanja daerah yang merupakan salah satu cerminan pembangunan di daerah. Pemda juga sebaiknya lebih optimal dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah yang bisa didapatkan, sehingga kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya akan semakin baik sesuai dengan tujuan diadakannya otonomi daerah. Selain itu pemda juga diharapkan lebih baik dalam mengalokasikan belanja di daerahnya, sebaiknya pemerintah lebih banyak mengalokasikan kepada pos belanja modal daripada belanja pegawai seperti yang saat ini terjadi. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, agar belanja yang dialokasikan lebih efektif dan efisien.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Saran yang dapat penulis berikan kepada peneliti selanjutnya yang adalah untuk dapat menambah indikator lain dalam menilai kinerja keuangan seperti tingkat pembiayaan SiLPA dan tingkat ketergantungan terhadap dana otonomi khusus bagi daerah-daerah dengan otonomi khusus, sehingga dapat menggambarkan kinerja keuangan lebih lengkap. Penulis juga berharap jika peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan periode dan wilayah penelitian, sehingga penelitian selanjutnya akan menggambarkan kondisi yang lebih komperhensif dan akurat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterbatasan Penelitian

1. Daerah yang menjadi objek penelitian terbatas hanya ada dalam satu provinsi.
2. Penelitian hanya dilakukan dengan data sekunder tanpa dilakukan wawancara mendalam untuk mengetahui kendala dalam pencapaian kinerja keuangan.
3. Penggunaan indikator kinerja keuangan hanya diambil dari LRA tanpa mempertimbangkan kinerja yang didapat dari laporan keuangan yang lain.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., dan Halim, A. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2): 17-32.
- Adam, M. 2019. Potret Politik Anggaran (Studi Kasus Tentang Alokasi Belanja Modal Pada APBD Kabupaten Halmahera Barat Periode 2011-2015). *PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(1), 1.
- Alam, S., dan Wahyudin, A. 2017. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Sulawesi Selatan. *Economix*, 5 (2).
- Algifari. 2010. *Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Anggraeny, S. N., Kudhori, A., dan Lestariningsih, T. 2017. Analisis Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Madiun Tahun 2011-2015). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 1.
- Arif, M., dan Arza, F. I. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* 9(16).
- Arini Sita, P. R. 2017. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Kalimantan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 2(2), 180-198.
- Badrudin, R. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bastian, I., dan Saat, S. 2006. *Akuntansi sektor publik suatu pengantar* (1 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Bergman, M., dan Lane, J.-E. 1990. Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Delima, N. A., Marwa, T., dan Yulianita, A. 2016. Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 69–78.
- Deswanto, D. B., Ismail, A., dan Hendarmin, H. 2017. Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010—2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(3), 187.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Dwijayanti, R. 2015. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Seindonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 43-66.
- Fama, E. F., dan Jensen, M. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301-325.
- Faud, M. R. 2016. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gerungan, S. F., Saerang, D. P. E., dan Pontoh, W. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 6(1).
- Halim, A., dan Kusufi, M. S. 2012. Akuntansi sektor publik. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*. Bandung: CAPS.
- Hygi Prihastuti, A., Taufik, T., dan Agusti, R. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *SOROT*, 10(2), 143.
- Indiyanti, N. M. D., dan Rahyuda, H. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(9), 4713.
- Indrajaya, D. 2019. Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(10), 2195-2225.
- Ismail, F. F., dan Sudarmadi, D. 2019. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Beton Elemen Persada. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 13.
- Jensen, C., dan Meckling, H. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Lane, J.-E. 2000. *The Public Sector: Concepts, Models and Approaches* (3 ed.). SAGE Publications Ltd.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, A. A. A. P. 2000. *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah / Dr. Mardiasmo*. Yogyakarta: Andi.
- Marlina, L. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Dan Budget Ratcheting Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal AKBIS*, 2(2), 11.
- Martini, K. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(2), 426-443.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Moe, T. M. 1984. The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science*, 28(4), 739–777.
- Nurmainah, S. 2013. Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 20(2).
- Pramono, J. 2014. Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- Purba, E. S., Pradipta, E. L., Manullang, R. T. T., & Nainggolan, B. R. M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Di Sumatera Utara. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1), 274-281.
- Rahmayati, A. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *EKA CIDA* 1(1).
- Riswan, dan Affandi, A. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera). *JURNAL Akuntansi & Keuangan*, 5(2).
- Rivai, V., dan Basri, A. F. M. 2005. *Performance Appraisal: Sistem yang tepat untuk menilai kinerja karyawan dan meningkatkan daya saing perusahaan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rofii, A. M., dan Ardyan, P. S. 2017. Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *JEB17: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(01).
- Sekretariat Negara. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- _____. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran*. Jakarta: Sekretarian Negara Republik Indonesia.
- Sugiarto, E. 2016. Analisis Emosional, Kebijakan Pembelian Dan perhatian Setelah Transaksi Terhadap Pembentukan Disonansi Kognitif Konsumen Pemilik Sepeda Motor Honda Pada Ud. Dika Jaya Motor Lamongan. *Jurnal Manajemen*, 1(1), 14.
- Sumarjo, H. 2010. *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*.
- Tamawiwiy, J., Sondakh, J. J., dan Warongan, J. D. L. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2).

Triyanto, D., Wahyudi, S. T., dan Ananda, C. F. 2017. The Effect of Capital Expenditure on Local Revenue: Study in East Java Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan,* 10(2).

Waryanto, P. 2017. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik,* 2(1), 35–55.

Zelmiyanti, R. 2016. Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi,* 7(1), 11-21.

Zuhri, M., dan Soleh, A. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis,* 4(2).

